**Village Fund Policy Implementation Strategy in Sumedang Regency**

**Restu Widyo Sasongko1, Ummu Salamah2, Ikin Sodikin3**

1,2,3Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

NPM. 159020018

Email: [restu\_widyo@ipdn.ac.id](mailto:restu_widyo@ipdn.ac.id)

**Abstract**

According to its goals, the Village Fund Policy is successful if it improves the health of rural people and promotes equitable village growth. The aim of this analysis is to investigate and evaluate the factors that contribute to the successful implementation of the Village Fund policy in Sumedang Regency, as well as the strategies that can be implemented. The researchers used observational research techniques in conjunction with a case study approach. This approach was selected in order to gather reliable data for the purpose of identifying important factors affecting the Village Fund strategy. The findings indicate that a variety of factors contribute to the policy's progress in Sumedang Regency, including the affected priorities, the benefits provided, the required degree of improvement, the role of policymakers and program implementers, the resources deployed, and the power and strategies of the actors involved. Institutional characteristics, as well as conformity and responsiveness. However, it is well established that the resource element has been underutilized, with the village relying entirely on funding sources from the Village Budget, the Village Fund Allocation, and other profit-sharing funds for government administration, growth, and community empowerment.

**Keywords:** Strategy, Policy Implementation, Village Fund.

—————————— ——————————

**ABSTRAK**

Kebijakan Dana Desa pada hakikatnya diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan. Oleh karenanya, diperlukan strategi implementasi yang tepat agar tujuan tersebut dapat terwujud. Penelitian ini hendak mengkaji dan menganalisis strategi yang dapat dilakukan serta keefektifan implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Sumedang berdasarkan faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penting serta strategi yang tepat terkait dengan implementasi kebijakan Dana Desa.

Penelitian menghasilkan tiga strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Sumedang berjalan efektif, yaitu konsistensi peraturan dan birokrasi kebijakan Dana Desa, optimalisasi sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, serta optimalisasi sarana kerja berbasis teknologi informasi. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya berbagai faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Dana Desa di Kabupaten Sumedang, yaitu kepentingan yang terpengaruhi, manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber daya yang terlibat, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, serta kepatuhan dan daya tanggap. Namun, faktor sumber daya diketahui belum dilibatkan secara optimal sehingga desa hanya mengandalkan sumber pendanaan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta dana bagi hasil lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian menghasilkan *novelty* berupa teridentifikasinya faktor lain yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor kultur sosial kelompok sasaran, kondisi *force majeure* selama implementasi berlangsung, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kasus implementasi kebijakan Dana Desa, dihasilkan *novelty* berupa perlunya perluasan penerapan skema Padat Karya Tunai Dana Desa serta pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen pendukung implementasi.

**Kata kunci**: Strategi implementasi kebijakan

**REFERENCES**

* + - 1. Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, *6*(1), 61-76.
      2. Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
      3. Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, *13*(2), 193-211.
      4. Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, *3*(2), 12-32.
      5. Firdaus, E. (2011). Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2).
      6. Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
      7. Idrus, M. (2016). *Metode Peneltian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Ed. 2, Jakarta: Penerbit Erlangga.
      8. Jabir, H. (2018). *Peran Tenaga Pendamping Desa Pada Pelaksanaan Program Pembagunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
      9. Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, *3*(1), 214-239.
      10. Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputiondo.
      11. Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
      12. Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, *6*(2), 107-116.
      13. Santoso, R. S. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas). *Journal of Public Policy and Management Review*, *7*(2), 649-664.
      14. Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *15*(1), 34-49.
      15. Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
      16. Sasongko, R. W. (2019). Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Rangka Mengoptimalkan Pembangunan Desa. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, *11*(4), 455-462.
      17. Sugiyono, (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
      18. Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V., & Mirah, A. D. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, *13*(2A), 335-342.
      19. Utama, L. S., Effendy, K., Ngadisah, N., & Wildan, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB. *MEDIA BINA ILMIAH*, *14*(1), 1887-1902.
      20. Widodo, I. S. (2016). Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Panorama Hukum*, *1*(1), 1-14.